

**IMPELEMENTASI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA
PULAU SEMAMBU KECAMATAN INDRALAYA UTARA
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**Fajri Ramadhan
NIM. 07011181823021**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA PULAU SEMAMBU KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Fajri Ramadhan

07011181823021

Pembimbing I

1. Drs. Mardianto, M.Si

NIP.196211251989121001

Tanda Tangan

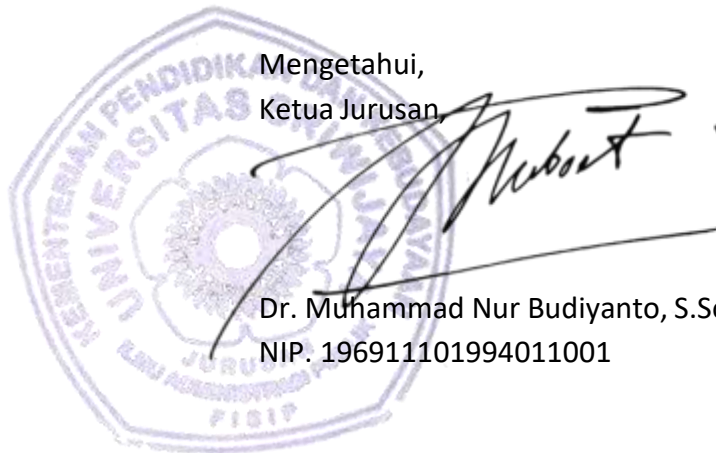


Tanggal

4-10-2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPELEMENTASI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA
PULAU SEMAMBU KECAMATAN INDRALAYA UTARA
KABUPATEN OGAN ILIR**

Skripsi
Oleh :

Fajri Ramadhan
07011181823021

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 13 Oktober 2021**

Pembimbing I

1. Drs. Mardianto, M.Si

NIP.196211251989121001

Tanda Tangan

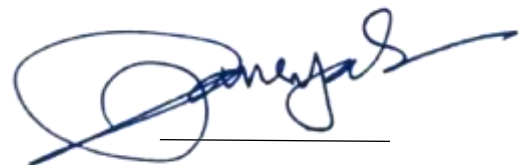
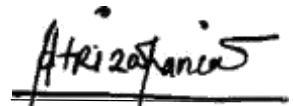


Penguji :

1. Dr. KATRIZA
IMANIA, M.SiNIP.
196810221997022001

2. JANUAR EKO ARYANSYAH S.IP
., SH., M.SINIP. 198801272019031005

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019940011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajri Ramadhan
NIM : 07011181823021
Tempat dan Tanggal Lahir : Prambatan, 6 Desember 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan
2. Karya Ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demiikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 22 November 2022

Yang membuat pernyataan,



FAJRI RAMADHAN
07011181823021

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

Do the best and let god do the rest

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berbagai fenomena yaitu rendahnya komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan musrenbangdes dan partisipasi masyarakat yang rendah dan diukur melalui variabel Kepatuhan, Lancarnya rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Teori Ripley and Franklin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : (1) Pemahaman masyarakat tentang mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Musrenbangdes sangat rendah; (2) isu partisipasi masyarakat sebagai faktor utama bermula dari pesimisme akibat keinginan yang tidak terpenuhi yang mempengaruhi usulan prioritas Musrenbangdes; (3) Peluang dialog terbuka masih sangat terbatas, karena keterbatasan anggaran.. Saran yang menjadi rekomendasi masukan pada penelitian ini, yakni Memberikan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dalam pelaksanaan Musrenbangdes perlu untuk melibatkan akademisi untuk mendampingi proses Musrenbangdes para akademisi akan menjadi fasilitator untuk memberikan berbagai pemahaman dan memberikan gambaran secara konsep teoritis idealnya proses kebijakan dan pemerintah harus menyediakan forum dialog terbuka sebelum pelaksanaan musrenbangdes dan membentuk model sosialisasi dan penyajian informasi yang massif dan efektif.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Musrenbangdes, Partisipasi

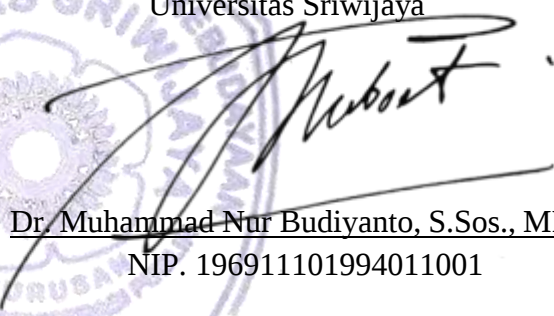
Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

Indralaya, Oktober 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) in Pulau Semambu Village, North Indralaya District, Ogan Ilir Regency. This research is motivated by various phenomena, namely the government's low commitment to the implementation of musrenbangdes and low community participation, and is measured through the Compliance variable, the smooth functioning of routines, and the realization of the desired performance and impact. This type of research is descriptive using qualitative research methods. The types of data used are primary data and secondary data, while data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation, and literature study. This research uses Ripley and Franklin Theory. The results of this study indicate that the implementation of village development planning deliberation has not been optimal due to several things, namely: (1) Public understanding of the mechanism for the preparation and implementation of the Musrenbangdes is very low; (2) the issue of community participation as the main factor stems from pessimism due to unfulfilled desires that affect the priority proposals for the Musrenbangdes; (3) Opportunities for open dialogue are still very limited, due to budget constraints. Suggestions that become recommendations for input in this research, namely providing training and coaching to improve the quality of human resources in carrying out village development planning deliberation, in the implementation of Musrenbangdes it is necessary to involve academics to accompany the Musrenbangdes process, academics will become facilitators to provide various understandings and provide an overview of theoretical concepts, ideally, the policy process and the government should provide an open dialogue forum before the implementation of the musrenbangdes and form a massive and effective socialization and presentation model of information.

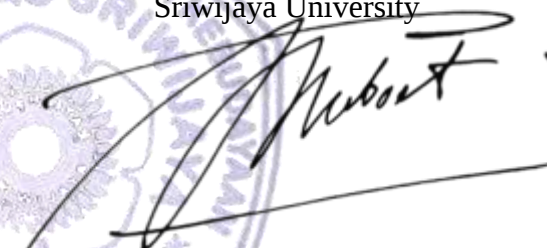
Keywords: Policy implementation, Musrenbangdes, Participation

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

Indralaya, october 2022
Head of Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan. Skripsi ini berjudul **“Impelementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (SI) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Sebab itulah dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Alisan dan Ibu Marlia yang telah memberikan dukungan serta doa-doa kepada saya
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Univrsitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
5. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini
8. Bapak Khairunnas S.IP., M.I.Pol serta Bapak Rahmat Rafinzar S.I.P., M.A.P saya ucapkan banyak terimakasih banyak karena telah turut membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya selama perkuliahan hingga saat ini
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan bantuan selama perkuliahan dan seluruh karyawan FISIP yang telah membantu penulis dalam skripsi ini
10. Teman seperjuanganku Mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2018 akan menjadi kenangan indah pernah menambah ilmu bersama kalian.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata

sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Maka untuk membangun wawasan penulis, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membaca.

Indralaya, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	III
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR SINGKATAN	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Kebijakan Publik	11
2. Implementasi Kebijakan Publik	16
3. Teori Implementasi Kebijakan	18
B. Teori implementasi yang digunakan ada penelitian ini	21
C. Musyawarah Pembangunan Desa	22
D. Kerangka Teori	25
E. Penelitian Terdahulu	27
F. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Definisi Konsep	33
C. Fokus Penelitian	34
D. Unit Analisis Data	36
E. Jenis dan Sumber Data	36
F. Informan Penelitian (<i>Key Informant</i>)	38
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Teknik Analisis Data	40
I. Jadwal Penelitian	43
J. Sistematika Penulisan	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah Singkat Kabupaten Ogan Ilir	45
2. Kondisi Geografis Kabupaten Ogan Ilir	47
3. Indralaya Utara	48
4. Luas Wilayah Menurut Desa Dalam Kecamatan Indralaya Utara	49
5. Desa Pulau Semambu	51

6. Letak geografis pulau semambu	52
7. Struktur pemerintahan desa.....	52
8. Visi dan Misi Desa Pulau Semambu.....	53
9. Demografi desa pulau semambu.....	54
10. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Pulau Semambu.	54
B. Hasil Penelitian.....	55
C. Pembahasan	78
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dengan Jumlah Peserta Musrenbangdes.....	7
Tabel 2 Data Rekapitulasi Usulan Musrenbangdes	8
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4 Fokus Penelitian	35
Tabel 5 Tahapan Kegiatan dalam Penelitian	43
Tabel 6 Jumlah Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021	48
Tabel 7 Luas Wilayah Menurut Desa Dalam Kecamatan Indralaya Utara	49
Tabel 8 Jumlah Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan Di Kecamatan Indralaya Utara, 2020	50
Tabel 9 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan Di Kecamatan Indralaya Utara. 2020.....	51
Tabel 10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia	54
Tabel 11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	55
Tabel 12 Hasil Temuan Penulis Berdasarkan Fokus Penelitian	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Sumatera Selatan	6
Gambar 2 Tahapan Kebijakan Publik dari Teori William Dunn.....	13
Gambar 3 Kerangka Berpikir Adopsi Teori Implementasi Kebijakan Ripley And Franklin (1985).....	31
Gambar 4 Administrasi Kabupaten Ogan Ilir.....	45
Gambar 5 Peta Adminitrasi Desa Pulau Semambu	52
Gambar 6 Struktur Perangkat Desa Pulau Semambu	53
Gambar 7 Dokumen Musrenbangdes Tahun Anggaran 2021	57
Gambar 8 Daftar hadir musyawarah perencanaan pembangunan desa Pulau Semambu Tahun Anggaran 2021	64
Gambar 9 Daftar hadir musyawarah perencanaan pembangunan desa Pulau Semambu Tahun Anggaran 2021	66
Gambar 10 Fasilitas pendukung pelaksanaan musrenbangdes.....	69
Gambar 11 Berita Acara Pelaksanaan Musrenbangdes 2021	71
Gambar 12 hasil notulensi rapat musrenbangdes tahun anggaran 2021.....	77

DAFTAR SINGKATAN

BPD	: Badan Permusyawaratan Desa.
KK	: Kepala Keluarga
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrenbangdes	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKP-Desa	: Rencana Kerja Pembangunan Desa
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pelaksanaan pembangunan nasional, baik pusat maupun daerah didasarkan atas demokrasi, sejalan dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, berlangsungnya kesatuan bangsa yang seimbang, serta bentuk proses demokrasi. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sekadar pada cara membangun kepercayaan baru terhadap institusi politik yang telah hancur. Dengan partisipasi dan musyawarah dalam urusan publik atau proses kelembagaan, diharapkan pemerintahan yang lebih efektif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pratama,2018).

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengatur tata kelola pemerintahannya sendiri selama tidak bertentangan dengan UUD 1945, agar tercipta kesejahteraan, pemberdayaan, dan pelayanan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Birokrasi pemerintah hingga saat ini masih diyakini sebagai ujung tombak pelaksana proses kebijakan atau program-program kerakyatan, terlebih dalam proses implementasi program karena secara legal formal jelas sekali bahwa konstitusi menjadi payung hukum yang sangat kuat bagi birokrasi untuk secara leluasa bekerja dan beraktifitas dalam proses kongkritisasi program-program yang ada. Adil Mubarak dalam (Ma'rif, 2010) menyatakan Otonomi daerah juga bertujuan untuk membangun kemandirian suatu daerah. Berdasarkan undang-undang inilah, kemudian lahir pemerintahan terendah di Indonesia, yaitu Pemerintahan Desa.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa: “Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan”. Selanjutnya masih dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan masyarakat. Memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa. Untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan desa, pemerintah desa dan seluruh aspek masyarakat harus ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Maka dalam mewujudkan pembangunan desa yang baik juga dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik pula (Nugroho, 2020).

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sudah lama menjadi harapan banyak orang sampai hari ini. Akan tetapi, banyak pemahaman tentang *good governance* yang berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar membayangkan bahwa, dengan *good governance* akan dapat membuat kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas *pelayanan public* menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga masyarakat (Indiahono, 2017).

Putri (2015) mengemukakan bahwa *good governance* merupakan bagian dari agenda reformasi yang pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang di harapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan, tak terkecuali di tataran Pemerintah Desa. Iasra, (2021) menguraikan sembilan prinsip dasar dari *good governance*, yaitu: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, peduli pada stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Untuk menjadi desa yang maju, maka pembangunan terhadap setiap desa menjadi penting. Peran desa (masyarakat dan pemerintah desa) diharapkan mampu menjadi sentra baru aktivitas pembangunan dan perekonomian baik fisik maupun non fisik, sehingga kemudian hal itu dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi antara desa dan daerah perkotaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* harus benar-benar secara maksimal diterapkan oleh pemerintah desa yang juga melibatkan masyarakat dalam upaya pembangunan desa (Rafinzar, 2020).

Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi

masyarakat merupakan salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik. Keberadaan partisipasi masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Suaedi, (2010) mengatakan bahwa pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial budaya baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari kegiatan seluruh rakyat di dalam suatu negara. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor dari keberhasilan otonomi daerah. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip pelaksanaan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah yang bersangkutan, (Kahar, 2012). Perencanaan partisipatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan dengan pelibatan masyarakat dilakukan dengan mekanisme musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga di tingkat provinsi. Pelaksanaan Musrenbang khususnya untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan setiap tahun menjadi suatu hal yang cukup menarik karena kegiatan ini menjadi sebuah agenda rutin yang dijalankan oleh pemerintah daerah pada tahapan perencanaan pembangunan dengan pelibatan masyarakat.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang di singkat musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang digunakan sebagai wadah penyusunan rencana pembangunan nasional, baik di pusat maupun di daerah. Penerapan

prinsip-prinsip tersebut di atas, dimulai dari proses pembangunan itu sendiri, dalam hal ini penyelenggaraan musrenbang. Oleh karena itu, musrenbang melibatkan stakeholder dalam masyarakat. Pelaksanaan musrenbang, khususnya di daerah, melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat desa/ kelurahan, hingga kabupaten/kota dan provinsi, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan menteri dalam negeri No.050-187/kep/bangda/2007 tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan musrenbang bahwa salah satu tujuan musrenbang adalah mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan.

Implementasi dari Musrenbang Daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1354/M.PPN/13/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dan Musrenbang tingkat Provinsi.

Musrenbang yang selama ini dilaksanakan cenderung hanya menjadi sebuah justifikasi terhadap sebuah proses perencanaan pembangunan daerah (Aryati, 2013). Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, namun pada tahapan penetapan program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai kebijakan terkadang tidak mengakomodir usulan yang berasal dari kebutuhan masyarakat. Salah satu tahapan penting pada proses pelaksanaan pemerintah dalam pengambilan keputusan adalah tahap perencanaan. Proses perencanaan tersebut akan menentukan keberhasilan dari pembangunan suatu desa.

Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dikatakan berhasil apabila dari hasil Musrenbang tersebut bisa di implementasikan dengan maksimal. Jadi dalam pelaksanaan Musrenbang baik dari tingkat desa, kecamatan bahkan sampai tingkat kabupaten bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban untuk merealisasikan programnya.



Gambar 1 Peta Administrasi Sumatera Selatan

Sumber: Sumsel dalam angka 2021

Berdasarkan dari gambar 1 diketahui bahwa Sumatera selatan memiliki 17 Kabupaten , 241 kecamatan dan 3289 Desa. Ma'rif (2010) menyampaikan bahwa Dalam pelaksanaan musrenbang diberbagai daerah yang ada di Sumatera Selatan, mulai dari tingkat desa dan kecamatan, hingga pada pelaksanaan musrenbang ketingkat kota memperlihatkan kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah. Hal ini kemudian menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.

Kejadian ini pastinya sangat mempengaruhi efektifitas hasil rapat yang ada, karena dapat dikatakan bahwa pihak pelaksana perencanaan pembangunan desa belum berperan dan aktif menjalankan tugasnya. Hal ini kemudian terjadi di sebuah desa di Sumatera Selatan, yaitu desa Pulau Semambu di Kecamatan Indraya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat

penting dalam pembahasan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam pertemuan tersebut, karena di kegiatan ini mereka dapat berkontribusi pada realisasi aspirasi yang diberikan atau realisasi kegiatan dalam perencanaan pembangunan Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indraya Utara, Kabupaten Ogan melaksanakan. Iilir.

Peneliti melakukan studi kasus tentang pelaksanaan Musrenbangdes di desa Pulau Semambu di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Iilir, Sumatera Selatan sebagai lokus penelitian. Terdapat beberapa permasalahan juga ditemukan dalam pelaksanaan Musrenbangdes tersebut. Berikut penulis akan mendeskripsikan dan memaparkan permasalahan dan data-data yang ditemui di lokasi penelitian. Adapun hal tersebut sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dengan Jumlah Peserta Musrenbangdes

No	Data Peserta	Jumlah (Jiwa)
1	Kepala Keluarga	512
2	Peserta Musrenbangdes	32
3	Presentase	16%

Sumber : Profil Desa dan Arsip Musrenbangdes tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1 Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dengan Jumlah Peserta Musrenbangdes dapat dilihat bahwa persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrebangdes belum maksimal dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan KK (Kepala Keluarga). Dari total seluruh jumlah KK di Desa Pulau Semambu dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes adalah 16%. Data di atas menunjukkan persentase jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes masih dalam kategori

rendah atau sedikit sehingga belum dapat dikatakan masyarakat yang hadir sudah mewakili populasi dari keseluruhan masyarakat yang ada di masing-masing desa.

Salah satu upaya pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses Musrenbangdes. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat hanya sebagian kecil yang diakomodir oleh pemerintah. Berikut data tentang jumlah usulan yang diajukan oleh masyarakat dan usulan yang disetujui.

Tabel 2 Data Rekapitulasi Usulan Musrenbangdes

No	Data Usulan	Jumlah Usulan
1	Usulan Masyarakat	1
2	Usulan Disetujui	1

Sumber : Arsip Musrenbangdes 2020

Berdasarkan tabel 2 Data Rekapitulasi Usulan Musrenbangdes menunjukkan persentase dari jumlah usulan yang diajukan dengan yang disetujui masih belum optimal. Dari seluruh usulan yang diajukan dalam Musrenbangdes di Desa Pulau Semambu berjumlah 1 usulan yang disetujui dari total 1 usulan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa antara usulan yang diajukan dan disetujui masih dalam persentase yang cukup kecil sehingga perlu dilihat penyebab hal tersebut dapat terjadi. Musrenbangdes sebagai forum masyarakat menyampaikan harapan dan aspirasinya tentu berharap melalui usulan yang diajukan dapat diakomodir lebih banyak karena hal tersebut merupakan penunjang aktivitas dalam kehidupan sosial masyarakat.

Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses Musrenbangdes dan juga keterlibatan masyarakat desa dalam memberikan usulan menunjukkan masih rendahnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes, sehingga pelaksanaan pola tersebut harus ditinjau kembali dari segi tata kelola pelaksanaan

Musrenbangdes. Pelaksanaan sistem kebijakan Musrenbangdes seharusnya memberikan kesempatan yang sama rata bagi setiap orang yang berpartisipasi dan harus memberikan atau menyediakan ruang dialog terbuka kepada publik dan juga keterbukaan terhadap akses informasi.

Berdasarkan data yang disajikan di atas, menunjukkan adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan musrenbangdes dilihat dari segi tata kelolanya yang masih belum maksimal. Kondisi yang terjadi di atas memberikan gambaran pelaksanaan musrenbangdes sehingga perlu untuk mengkaji pelaksanaan tersebut dari segi tata kelolanya dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Secara khusus aspek yang dilihat pada Musrenbangdes tersebut meliputi partisipasi, transparansi, berorientasi pada kesepakatan, dan akuntabilitas

Secara khusus penelitian ini akan mengambil lokus penelitian di Desa Pulau Semambu, kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana tata kelola Musrenbangdes dan keterlibatan masyarakat dalam agenda tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu: **Bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan informasi mengenai hal yang akan didapatkan setelah menyelesaikan penelitian (Hasan, 2002). Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.
2. Menganalisis peran pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbangdes.

D. Manfaat

Manfaat penelitian yang di harapkan untuk penulisan ilmiah ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi *stakeholder* yang terlibat dalam Musrenbangdes. Hasil penelitian dari tata kelola Musrenbangdes ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemerintah desa dalam menjaring aspirasi dari masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengelolaan musrenbangdes di Desa Pulau Semambu Kabupaten Ogan ilir

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Andreas G. Ch. Tampi. (2016). Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu. *Acta Diurna*, V(1), 3.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Fadil, fathurrahman. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*.
- Gunawan, A. (2020). 5 Dimensi Dampak Kebijakan Covid-19 Terhadap Sistem Keolahragaan Nasional. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(1), 24–42. <https://doi.org/10.20473/jap.v12i1.23299>
- Hadi Suroso, Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17:1, 9.
- Hariyanto. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Musrenbangdes di Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 7720–7735. <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/7522/4725>
- Hasan, I. M. (2002). *Metodologi penelitian dan aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Iasra, M. F., Erwin, E., & Syarfi, W. (2021). ANALISIS PENGGUNAAN DANA TATA KELOLA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN). *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1). <https://doi.org/10.35906/jep01.v7i1.768>
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis* (1st ed.). Penerbit Gava Media.
- Kahar, I. A. (2012). Konsep Kepemimpinan dalam Perubahan Organisasi (Organizational Change) pada Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Proceedings of the Geologists' Association*, 37(4), 420–432. [https://doi.org/10.1016/S0016-7878\(26\)80013-6](https://doi.org/10.1016/S0016-7878(26)80013-6)
- Ma'rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang. *Riptek*.
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(5), 95–115.
- Masriani. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–13.
- Murti, H. (2013). *PDAM KOTA MADIUN*. 1(1), 10–17.
- Nugroho, H. S. R. (2020). INOVASI KEBIJAKAN SEBAGAI PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA WUKIRSARI KABUPATEN SLEMAN. *Jurnal Agregasi*, 8(2), 129–144.
- Pratama, M. R., Azikin, R., Ilmu, J., Negara, A., Makassar, U., Ilmu, J., Negara, A., Makassar, U., Ilmu, J., Negara, A., & Makassar, U. (2018). *UTARA*. 4(April), 34–51.
- Putri, N. P., Program, M., Ilmu, S., Negara, A., & Airlangga, U. (2015). Studi Eksplorasi Tentang Variabel Pendukung Keberhasilan Aplikasi Sistem E- Musrenbang di

- Bappeko Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*.
- Rafi, M. (2017). *Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014-2015*. 4(2).
- Rafinzar, R., & Kismartini, K. (2020). Inovasi e-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Faktor Pendukung dan Penghambat Program e-Musrenbang di Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Roza, Darmini & Arliman S., L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa Darmini Roza * dan Laurensius Arliman S ** A . Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mempertahankan pemerintah. *Ilmu Hukum PJIH UNPAD*, 4(26), 606–624.
- Satrio, F. F. (2020). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak*. 1.
- Suaedi, F. dan B. W. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ulfa. (2019). Implementasi Kebijakan E-Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Palopo. *Jurnal I La Galigo Public Administration Journal*, 2(1), 51–59. <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/195>
- Urrahmi, M., Putri, N. E., Pada, P., Kota, P., & Tahun, P. (2020). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI NAGARI SUNGAI NANAM KABUPATEN SOLOK* Afda. 2(2), 9–17.
- Yunas, N. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 7, 1, 9.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1354/M.PPN/13/2014 Tahun 2014